

**AKIBAT HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER
PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN POLYSOMNOGRAPH
DI RUMAH SAKIT DUREN SAWIT DINAS KESEHATAN
PROPINSI DKI JAKARTA (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU,
PN DAN MA)**

Guno Wardoyo

ABSTRAK

Salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat adalah persekongkolan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu contoh kasus persekongkolan adalah pelaksanaan tender pengadaan alat kedokteran Polysomnograph di Rumah Sakit Duren Sawit Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaturan persekongkolan tender menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, alasan Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dalam tingkat banding yang telah membatalkan Putusan KPPU, dan akibat hukum pembatalan Putusan Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Negeri. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang dengan menggunakan sumber data sekunder, dan teknik analisis data kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, prosedur pemeriksaan dan sanksi hukum yang dilakukan KPPU atas dugaan persekongkolan telah sesuai dengan undang-undang, dimana untuk membuktikan adanya persekongkolan KPPU menggunakan prinsip *rule of reason*. Mahkamah Agung membatalkan Putusan banding Pengadilan Negeri dengan alasan bahwa, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum. Kemudian, terjadinya Putusan Pengadilan Negeri yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan salah menerapkan hukum, maka persoalannya tidak hanya sebatas tersedianya upaya hukum untuk mengajukan keberatan, namun berakibat pada aspek penegakan hukum. Saran yang dapat disampaikan adalah perlunya merevisi UU Nomor 5 Tahun 1999 yang mempertegas pengertian persekongkolan tender, dalam putusan tingkat banding harus berdasarkan undang-undang agar kesalahan dalam penerapan hukum dalam setiap menangani perkara dapat dihindari, dan demi terciptanya keadilan dan penegakan hukum dalam persaingan dunia usaha, seharusnya Mahkamah Agung dapat memberikan sanksi hukum yang lebih berat sesuai ketentuan Pasal 47 UU No. 5/1999 agar dapat menimbulkan efek jera.

Kata kunci : Persekongkolan, Tender, KPPU.

**A RESULT OF THE LAW OF CONSPIRACY TENDER FOR
MEDICAL EQUIPMENT POLYSOMNOGRAPH DUREN
SAWIT HOSPITAL DKI JAKARTA PROVINCIAL HEALTH
OFFICE. (A CASE STUDY FOR A DECISION OF
COMMISSION, DISTRICT COURT AND THE SUPREME
COURT)**

Guno Wardoyo

ABSTRACT

One form of action that may result in unfair competition is a conspiracy as mentioned in Article 22 of Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. One example is the implementation of the conspiracy case procurement of medical equipment Polysomnograph in Duren Sawit Hospital DKI Jakarta Provincial Health Office of Fiscal Year 2007. Formulation of the problem in this research is bid rigging arrangement according to Law No. 5 of 1999, the Supreme Court overturned the reason District Court in appeal level has canceled the Commission's Decision, and the legal consequences of the Supreme Court against the verdict cancellation District Court. This type of research is normative juridical statute approach using secondary data sources, and qualitative data analysis techniques with methods of descriptive analysis. The results showed that, inspection procedures and sanctions of the law on suspicion of conspiracy Commission in accordance with the law, where the Commission to prove the existence of a conspiracy to use the principle of rule of reason. The Supreme Court canceled the verdict appeal the District Court on the grounds that, *Judex facti* / District Court had misapplied the law. Then, the District Court which annulled by the Supreme Court on the grounds misapplied the law, then the problem is not only limited to the availability of legal remedies to raise objections, but results in the aspect of law enforcement. Suggestions can be submitted is the need to revise Law No. 5 of 1999 which reinforces the sense of bid rigging, the appellate decision must be based on laws that errors in the application of the law in every handling cases can be avoided, and for the creation of justice and law enforcement in the competitive business world , the Supreme Court should be able to provide greater legal sanctions in accordance with Article 47 of Law No. 5/1999 to be a deterrent effect.

Keywords: Conspiracy, Tender, KPPU.